

# **PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEIMIGRASIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN**

**Handy Pratama Prabaswara**

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Negeri  
Jakarta  
e-mail:

## **Abstrak**

Landasan yuridis mengenai pengaturan lalu lintas keluar masuknya orang asing di Indonesia tertuang dalam UU Keimigrasian, yang menetapkan kewajiban-kewajiban serta batasan-batasan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana serta untuk mengetahui cara meningkatkan peran dan fungsi penegakan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Diperoleh kesimpulan bahwa setiap warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya bisa dikenakan pidana penjara serta pidana denda berdasarkan Undang- Undang tentang Keimigrasian. Sementara untuk sampai pada penerapan sanksi pidana terhadap orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian melalui proses sesuai dengan ketentuan KUHAP, diperlukan dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan peran dan fungsi penegakan hukum PPNS dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian, maka hambatan-hambatan tersebut haruslah diatasi dengan cara-cara seperti melakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas penyidikan; memberikan motivasi; membuat standar pendidikan PPNS Keimigrasian yang komprehensif; melakukan sosialisasi tentang masalah keimigrasian dengan bekerja sama dengan instansi terkait; melakukan koordinasi; dan meningkatkan pengawasan dan kehati-hatian.

**Kata Kunci:** Keimigrasian, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana

**(THE ROLE OF IMMIGRATION CIVIL SERVICE  
INVESTIGATORS IN HANDLING IMMIGRATION CRIMINAL  
ACTIONS)**

**Handy Pratama Prabaswara**

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Negeri  
Jakarta  
e-mail:

***Abstract***

The juridical basis regarding the regulation of traffic in and out of foreigners in Indonesia is contained in the Immigration Law, which establishes certain obligations and limitations. The purpose of this research is to find out and study the implementation of law enforcement against immigration crimes based on the Immigration Law and Criminal Procedure Law and to find out how to improve the role and function of Civil Servant Investigator (PPNS) law enforcement in law enforcement in the immigration sector. This research is a normative juridical study, using a descriptive analytical approach. It was concluded that every foreign citizen who deliberately abuses or carries out activities that are not in accordance with the intent and purpose of granting the residence permit granted to him may be subject to imprisonment and a fine under the Law on Immigration. Meanwhile, to arrive at the imposition of criminal sanctions against foreigners who perpetrate criminal acts of immigration through a process in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, it is necessary to base judges' considerations in making decisions. To improve the role and function of PPNS law enforcement in law enforcement in the immigration sector, these obstacles must be overcome by means of such as determining the priority scale in carrying out investigative tasks; giving motivation; create comprehensive immigration PPNS education standards; conduct outreach on immigration issues in collaboration with related agencies; coordinate; and increase surveillance and prudence.

**Keywords:** *Immigration, Investigators, Civil Servants, Crime*